

**KEDISIPLINAN PEGAWAI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR
CAMAT LONG IKIS KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR TAHUN 2016**

Oleh: Ranggi Yuska Pratiwi

ranggiyuska@gmail.com

Pembimbing: Dr. H. Ali Yusri, MS

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Public service is basically an effort carried out by a person, group or bureaucracy to provide assistance and facilities to the community in achieving a certain goal. The purpose of a public service in general is to be able to satisfy the public regardless of anything. The background of this research is that the staff of the Long Ikis Sub-District Office in public services lacked discipline so that the services provided at the Camat's Office were not optimal. The formulation of the problem from this research is How is the application of employee discipline in public services at the Office of the Long Ikis Sub-District of Paser Regency, East Kalimantan in 2016?

This study aims to determine the application of employee discipline in public services at the Office of the Long Ikis Sub-District of Paser Regency, East Kalimantan Province in 2016 and to find out the causes of indiscipline in public services at the Office of the Long Ikis Sub-District in East Kalimantan Paser Regency in 2016. This study uses qualitative with descriptive research types. Data collection techniques used were interviews and documentation. Data analysis was carried out in a descriptive manner on the Discipline of Employees in Public Service in the Office of the Long Ikis District Head of 2016 obtained from written documents and interviews.

The results showed that the discipline of employees in public service at the Long Ikis Sub-District Office in 2016 had not run optimally, this was seen from several problems such as time discipline, task discipline and behavioral discipline. The reasons for the low discipline of employees in public services at the Office of the Long Ikis Sub-District of Paser Regency in East Kalimantan in 2016 are due to goals and abilities, role models, inherent supervision, legal sanctions and firmness.

Keywords: Local Government, Public Service, Discipline

Pendahuluan

Pemerintah pada awalnya dibentuk untuk menghindari keadaan dimana sebuah wilayah yang dihuni oleh masyarakat serba mengalami kekacauan. Aktifitas pemerintah dalam upaya memelihara kedamaian dan keamanan suatu wilayah menjadi kewenangan utama baik secara internal maupun eksternal. Sebagaimana tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimasyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar. Dengan kata lain, pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat yang merupakan fungsi primer dari pemerintah.

Pelayanan publik pada dasarnya merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau birokrasi untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Tugas pokok pemerintah yang terpenting adalah memberikan pelayanan umum kepada publik/masyarakat. Oleh karena itu, organisasi pemerintah sering pula disebut sebagai “pelayanan publik” (*Public Servant*).

Tujuan dari suatu pelayanan publik pada umumnya adalah dapat memuaskan masyarakat tanpa memandang apapun. Untuk itu dalam penyelenggaraan pelayanan publik dituntut kualitas prima yang tercermin dengan adanya transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, dan keseimbangan hak dan kewajiban. Setiap pelayanan publik harus memenuhi harapan publik, dan inilah yang dimaksud dengan pelayanan publik yang berkualitas. Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mampu memenuhi harapan masyarakat.

Kedisiplinan dapat diartikan kesadaran dan kesediaan seseorang

mentaati peraturan instansi dan norma-norma yang berlaku. Untuk menciptakan produktivitas yang tinggi tidaklah mudah untuk dilakukan. Faktor pentingnya adalah pelaksanaan disiplin kerja pegawai itu sendiri. Disiplin yang dimaksud adalah mengenai disiplin waktu kerja dan disiplin dalam mentaati peraturan yang ditetapkan. Karena perlu kesadaran tinggi dalam melaksanakan aturan yang diwujudkan dalam disiplin kerja yang tinggi, maka produktivitas kerja akan tercapai.

Provinsi Kalimantan Timur memiliki 7 Kabupaten dan 3 Kota di antaranya Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, Kota Bontang dan Kota Samarinda.

Kabupaten Paser ialah Kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Timur. Ibu kota Kabupaten ini terletak di Tana Paser dan Kabupaten Paser memiliki 10 Camat 139 desa dan 5 Kelurahan dan salah satunya adalah Camat Long Ikis. Camat Long Ikis ini terletak di jalan Negara. Dan akses untuk menuju ke Kantor Camat Long Ikis sangat terjangkau karena letak Kantor Camat Long Ikis ini berada di tengah-tengah keramaian.

Dalam proses jalannya pelayanan di Camat Long Ikis masih adanya permasalahan yang timbul sehingga pelayanan di Kantor Camat Long Ikis tidak berjalan sebagai mana mestinya. Kurang disiplinnya para pegawai Kantor Camat Long Ikis dalam melakukan pekerjaan seperti pelanggaran jam kerja dan pegawai Kantor Camat Long Ikis lebih mementingkan urusan pribadi ketimbang urusan Kantor, keterlambatan masuk kerja serta keterlambatan pelayanan.

Rumusan Masalah

Untuk memberikan arahan tentang pembahasan atau analisa yang dilakukan dalam penelitian ini maka penulis mengemukakan perumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian”**Bagaimana Penerapan Kedisiplinan Pegawai dalam Pelayanan Publik di Kantor Camat Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016?**”

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui penerapan kedisiplinan pegawai dalam pelayanan publik di Kantor Camat Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016
2. Untuk mengetahui sebab-sebab ketidakdisiplinan pegawai dalam pelayanan publik di Kantor Camat Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016

KERANGKA TEORI

Teori Disiplin Kerja

Menurut **Nitiseminto (1996:118)** dalam menegakkan kedisiplinan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Disiplin waktu adalah suatu sikap kegiatan yang ditunjukkan oleh karyawan terhadap berbagai peraturan tentang jam masuk kerja dan jam pulang kerja serta pemanfaatan jam-jam lainnya.
2. Disiplin tugas adalah suatu sikap ketaatan yang dijadikan oleh karyawan terhadap berbagai ketentuan yang berhubungan dengan tugas, seperti memenuhi ketentraman dan menyelesaikan tugas tepat

waktu yang telah ditentukan atasannya.

3. Disiplin tingkah laku adalah suatu sikap yang baik di Kantor maupun diluar Kantor terutama sekali dalam melayani masyarakat begitu terlihat tata karma dan sopan santun.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran fakta atau fenomena yang terjadi menurut bahasa, cara pikir, pandangan subjek penelitian dan memahami secara sistematis dan akurat yang berhubungan dengan realita di lapangan berdasarkan data atau informasi yang ada.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Hamidi penelitian kualitatif mengumpulkan data berupa cerita rinci dari para informan dan diungkapkan dengan apa adanya sesuai dengan bahasa, dan pandangan peneliti.

PEMBAHASAN

Dalam penerapan kedisiplinan pegawai Kantor Camat Long Ikis mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Faktor kedisiplinan memiliki pengaruh yang kuat dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam setiap instansi pemerintahan, keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan selain itu sangat ditemukan oleh mutu profesionalitas juga ditentukan disiplin para anggotanya. Sebagai sebuah tolak ukur dalam keberhasilan organisasi maka dalam hal ini Kedisiplinan Pegawai dalam Pelayanan Publik di Kantor Camat Long Ikis Kabupaten

Paser sangat memprioritaskan faktor kedisiplinan menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, penegakan disiplin merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi, guna menumbuh kembangkan ketertiban sehingga para pegawai mematuhi semua peraturan dan prosedur yang berlaku.

Disiplin merupakan sikap atau perilaku ketaatan seseorang atau sekelompok orang yang sesuai dengan prosedur serta terhadap peraturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang tercermin dalam bentuk tingkah laku dan perbuatan.

1. Disiplin Waktu

Disiplin waktu adalah suatu sikap kegiatan yang ditunjukkan oleh pegawai terhadap berbagai peraturan tentang jam masuk kerja dan jam pulang kerja serta pemanfaatan jam-jam lainnya. Ditetapkannya peraturan tertulis dan tidak tertulis diharapkan agar para pegawai memiliki sikap disiplin yang tinggi dalam bekerja, sehingga produktivitas kerja meningkat.

Disiplin waktu menjadikan sorotan utama bagi seorang pimpinan dan pegawai. Jam kerja biasanya menjadi parameter utama kedisiplinan pimpinan dan pegawai. Salah satu faktor yang mempengaruhi kedisiplinan pegawai di Kantor Camat Long Ikis adalah adanya pemimpin yang mampu mempengaruhi dan mendorong pegawai untuk bertindak disiplin. Seorang Camat sebagai pemimpin dilingkungan Kantor Camat harus menunjukkan sikap positif dan disiplin agar dapat menjadi teladan kedisiplinan bagi para pegawai Kantor Camat Long Ikis. Untuk dilingkungan Kantor Camat Long Ikis sendiri, para pegawainya masih mencerminkan perilaku tidak disiplin waktu. Hal ini dikarenakan Camat Long Ikis tidak mencerminkan perilaku disiplin kepada

para pegawai dan tidak disiplin dalam hal jam kerja.

Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menjelaskan bahwa setiap PNS wajib masuk kerja dan mentaati jam kerja, namun dalam hal ini di Kantor Camat Long Ikis belum sepenuhnya menjalankan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Diketahui bahwa sanksi yang diberikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dibagi menjadi 3 kategori hukuman seperti hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat. Meskipun sudah diberlakukan hukuman tegas masih banyak pegawai yang melakukan pelanggaran.

2. Disiplin Tugas

Disiplin tugas adalah suatu sikap ketaatan yang dijadikan oleh pegawai terhadap berbagai ketentuan yang berhubungan dengan tugas, seperti memenuhi ketentraman dan menyelesaikan tugas tepat waktu yang telah ditentukan atasannya.

Disiplin tugas ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan pegawai dalam menjalankan tugas sesuai dengan bidangnya. Untuk melaksanakan tujuan pekerjaan di Kantor Camat Long Ikis ini mengacu kepada Standar Optasional Procedur (SOP). Sehingga proses penyelesaian pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini Kantor Camat Long Ikis melalui keputusan Camat telah menetapkan Prosedur tetap/Standar Operating Procedure (SOP) Pelayanan Kantor Camat Long Ikis.

**Daftar Standar Oproasional Procedur
(SOP) Pelayanan Kantor Camat
Long Ikis Tahun 2016**

No	Jenis SOP	Keterangan
1.	Pemberian cuti tahunan, cuti alasan penting, cuti diluar tanggung jawab Negara, cuti sakit, dan cuti bersalin	SOP Terlampir
2.	Pengelolaan surat keluar	SOP Terlampir
3.	Pengelolaan surat masuk	SOP Terlampir
4.	Pelayanan izin gangguan	SOP Terlampir
5.	Pelayanan umum non perijinan	SOP Terlampir
6.	Penyusunan LAKIP	SOP Terlampir
7.	Pelaksanaan musyawarah pembangunan Camat	SOP Terlampir
8.	Pelayanan izin bangunan	SOP Terlampir
9.	Mekanisme pembuatan RKA Camat Long Ikis	SOP Terlampir
10.	Mekanisme pembuatan RENJA Camat Long Ikis	SOP Terlampir
11.	Mekanisme pembuatan RENSTRA Camat Long Ikis	SOP Terlampir
12.	Mekanisme pembuatan	SOP Terlampir

	Surat Gal C Camat Long Ikis	
13.	Pelayanan KK & KTP	SOP Terlampir
14.	Pelayanan izin keramaian	SOP Terlampir
15.	Pelayanan Rekomendasi Kedunia Usaha	SOP Terlampir
16.	Pelayanan perpanjangan Rekomendasi Keperusahaan	SOP Terlampir
17.	Pelayanan Rekomendasi Nikah	SOP Terlampir
18.	Permohonan Pelayanan SPPHAT	SOP Terlampir

*Sumber : Standar Oproasional
Prosedur Kantor Camat Long
Ikis, Tahun 2016*

Bila dihubungkan dengan keadaan di Kantor Camat Long Ikis terkait proses jalannya SOP Kantor Camat Long Ikis masih ditemukannya beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pegawai Kantor Camat Long Ikis dimana hal ini akan mempengaruhi visi misi serta tujuan yang nantinya akan dicapai.

3. Disiplin Tingkah Laku

Disiplin tingkah laku adalah suatu sikap yang baik di Kantor maupun diluar Kantor terutama sekali dalam melayani masyarakat begitu terlihat tata karma dan sopan santun. Disiplin merupakan sikap atau perilaku ketaatan seseorang atau sekelompok orang yang sesuai dengan prosedur serta terhadap peraturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang

tercermin dalam bentuk tingkah laku dan perbuatan.

Dalam bertingkah laku seharusnya pegawai dapat meletakkan tingkah laku yang baik dan prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat dan instansi terkait merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pegawai yang bersangkutan.

Menurut hasil pengamatan serta beberapa info yang didapatkan dari beberapa informan terkait tingkah laku pegawai Kantor Camat Long Ikis jauh berbeda dengan yang diharapkan, banyak diantara masyarakat yang mengeluhkan proses pelayanan serta kenyamanan yang diberikan oleh pegawai di Kantor Camat Long Ikis.

Sebab-sebab ketidakdisiplinan Pegawai dalam Pelayanan Publik di Kantor Camat Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010

Dalam proses organisasi kedisiplinan merupakan salah satu aspek yang menjadi tolok ukur dalam mengukur optimal tidaknya suatu pelayanan yang ada disuatu organisasi pemerintahan, untuk itu pegawai pemerintah yang dalam hal ini ialah pegawai Kantor Camat Long Ikis memerlukan pemahaman tentang landasan kedisiplinan, sebab saat ini banyak sekali terjadi penurunan kualitas pelayanan publik akibat kurang disiplinnya pegawai pemerintah, karena kedisiplinan merupakan upaya untuk menunjang keberhasilan dalam meningkatkan proses pelayanan publik.

1. Tujuan dan Kemampuan

Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan pegawai. Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan diterapkan secara ideal serta cukup menantang bagi

kemampuan pegawai. Hal ini berarti tujuan (pekerjaan) yang dibebankan kepada pegawai harus sesuai dengan kemampuan pegawai bersangkutan, agar dia bekerja sungguh-sungguh dan disiplin dalam mengerjakan.

2. Teladan Pemimpin

Teladan pemimpin sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan pegawai karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya. Pimpinan harus memberikan contoh yang baik, berdisiplin baik, jujur, adil, serta sesuai kata dengan perbuatan. Dengan teladan pimpinan yang baik, kedisiplinan bawahan pun akan ikut baik.

3. Waskat (pengawasan melekat)

Waskat (pengawasan melekat) adalah tindakan nyata dan paling efektif dalam mewujudkan kedisiplinan pegawai. Dengan waskat berarti atasan harus aktif dan langsung mengawasi perilaku, moral, sikap, gairah kerja, dan prestasi kerja bawahannya.

4. Sanksi Hukum

Sanksi hukum yang berperan dalam memelihara kedisiplinan pegawai. Dengan sanksi hukum yang semakin berat, pegawai akan semakin takut melanggar peraturan-peraturan perusahaan, sikap dan perilaku *indisipliner* pegawai akan berkurang. Berat/ringan sanksi hukuman yang akan diterapkan ikut mempengaruhi baik buruknya kedisiplinan pegawai.

5. Ketegasan

Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi kedisiplinan pegawai perusahaan. Pimpinan harus berani dan tegas, bertindak untuk menghukum setiap pegawai yang *indisipliner* sesuai dengan sanksi hukuman yang telah ditetapkan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan didalam skripsi ini, maka penulis dapat menyimpulkan mengenai Kedisiplinan Pegawai dalam Pelayanan Publik di Kantor Camat Long Ikis tahun 2016 yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan kedisiplinan pegawai dalam pelayanan publik di Kantor Camat Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 belum berjalan dengan maksimal, dilihat dari beberapa permasalahan seperti disiplin waktu, disiplin tugas dan disiplin tingkah laku.
2. Sebab-sebab ketidakdisiplinan pegawai dalam pelayanan publik di Kantor Camat Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 dikarenakan tujuan dan kemampuan, teladan pemimpin, pengawasan melekat, sanksi hukum dan ketegasan.

Saran

1. Dibutuhkan partisipasi semua pegawai baik atasan dan bawahan dilingkungan Kantor Camat Long Ikis untuk menegakkan disiplin kerja, tanggung jawab serta pemahaman yang baik mengenai disiplin. Dan memperinci

kembali disiplin-disiplin kerja yang ingin diterapkan sehingga pegawai lebih memahami dan tidak melakukan pelanggaran lagi.

2. Dengan memberikan insentif dalam bentuk bonus, penghargaan menjadi pegawai teladan, memberikan kesempatan kenaikan jabatan, upah dan diharapkan untuk memotivasi pegawai untuk mendisiplinkan diri. Pegawai yang diharapkan ialah orang-orang yang lebih bisa menanamkan rasa tanggung jawab dan sikap disiplin terhadap pekerjaan yang diberikan sehingga dapat mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai. Dan diharapkan untuk peraturan yang sudah ada dapat lebih ditekankan kembali sehingga para pegawai dapat lebih menghargai arti penting kedisiplinan dalam bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agung, Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan
- Hasibuan, Melayu S.P. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Siagian, Sondang P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara

Sastrohadiwiryo, B. Siswanto. 2003. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasioanl*. Jakarta: Bumi Aksara

Simanjuntak, Payman. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Kedua. Yogyakarta: STIE YKPN

Simamora, Henry. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Kedua. Yogyakarta: STIE YKPN

Nitseminto, Alex. 1996. *Manajemen Personalia*. Jakarta: Graha Indonesia

Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. 2002. *Metode Penelitian*. Bandung: Mandar Maju

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta

Hamidi. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press

Skripsi

Gita Crstalia, Ones. 2015. "Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo". Skripsi Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Negeri Yogyakarta.

Yusup Pramana, Deni. 2013. "Kewenangan Camat dalam Penegakan disiplin Pegawai

Negeri Sipil Daerah (Studi di Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon)". Skripsi Sarjana Ilmu Politik Universitas Jendral Soedirman Purwokerto.

Faldo Nantes, Febie. 2017. "Pelayanan Publik dalam pengurusan KTP di Kecamatan Koto Kampar Hulu Tahun 2014". Skripsi Sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

Bunda Ulil, Mutiara. 2014. "Tinjauan Pelaksanaan Disiplin Kerja Pegawai Di Kecamatan Astanaanyar Bandung". Skripsi Sarjana Ilmu Administrasi dan Keuangan.

Undang-Undang dan Peraturan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undnag Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Dokumen

Rencana Strategis Dinas Badan Kependidikan, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser Tahun 2016-2021

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Long Ikis Tahun 2016